

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Nike Ardiansyah*, Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia

*Co-Author Email: nike.ardiansyah@Universitasmbojobima.ac.id

Article Information

Submitted: 11

Desember 2023

Accepted: 22

Januari 2024

Online Publish: 22

Januari 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima menunjukkan variasi dan faktor-faktor seperti pendidikan dan akses informasi memainkan peran kunci. peran pemerintah desa memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas musyawarah. Keterlibat aktif pemerintah desa dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas menjadi dasar untuk keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan. Identifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan menjadi kunci untuk perbaikan. Startegi pengelolaan konflik dan peningkatan alokasi sumber daya dapat memfasilitasi proses musyawarah dengan lebih lancar. Penggunaan teknologi informasi masih terbatas, namun potensial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan Desa*

Abstract

This study aims to determine the stages of implementation of the Risa Village Development Planning Deliberation, Woha District, Bima Regency. This type of research is qualitative descriptive research. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The analysis technique is qualitative descriptive analysis, which starts from data reduction, data display, and verification and conclusions. The results of this study that community participation in the development planning deliberations of Risa Village, Woha District, Bima Regency show variations and factors such as education and access to information play a key role. The role of village government has a significant impact on the effectiveness of deliberation. The active involvement of village governments in maintaining transparency, accountability and inclusivity is the basis for successful development planning deliberations. Identification of barriers such as limited resources and conflicts of interest is key to improvement. Conflict management strategies and improved resource allocation can facilitate a smoother deliberation process. The use of information technology is still limited, but has the potential to increase transparency and participation.

Keywords: *Implementation, Deliberation, Planning, Village Development*

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Nike Ardiansyah, Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani/Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima/Vol 4 No 6 (2024)

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.310>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sebuah forum yang melibatkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam merencanakan pembangunan di Desanya (Maulana et al., 2023). Musyawarah Perencanaan Pembangunan diawali dengan Pra Musyawarah Perencanaan dan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) dan akan dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebangdes) dalam Musyawarah di tingkat Kecamatan akan di delegasikan oleh kepala Desa dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebangdes) tersebut untuk mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan, yang akan dituang dan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten, yang digunakan untuk mensinkronkan dan membahas agenda perencanaan pembangunan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas/Badan dalam menjalankan Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima (Listina & Pratama, 2023).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai sebuah kenyataan demokrasi dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan penganggaran daerah dengan dasar : (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Rusmin et al., 2019). (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (3) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat operasionalnya diatur mulai terbitnya ; (1) Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Triono et al., 2022). (2) Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007. (3) Surat Edaran Bupati (SEB) Kabupaten Bima 050/22/25/2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2011. Didalam semua regulasi tersebut menyatakan bahwa peran serta masyarakat adalah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Taufiq Widodo & Kartika, 2021).

Pembangunan desa merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Desa Risa, yang terletak di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menjadi fokus perhatian karena peran strategisnya dalam mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan (Christijanto, 2018). Musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Risa menjadi sebuah mekanisme partisipatif yang esensial untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Nasir & Maulana, 2021).

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan desa (Asril & Yoserizal, 2019). Namun, dalam konteks pelaksanaannya, terdapat kompleksitas dan dinamika yang mempengaruhi efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Risa (Triyo Rachmadi et al., 2021).

Berbagai faktor seperti partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa, pengelolaan konflik kepentingan, dan faktor-faktor eksternal mungkin memengaruhi tahapan pelaksanaan musyawarah (Ma'rif et al., 2010). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Iskandarsyah Siregar, 2022).

Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktis dan teoretis tentang dinamika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat ditemukan solusi dan

rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Risa, sekaligus memberikan pandangan yang lebih luas terkait perencanaan pembangunan desa (Andriani, 2022). Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Wijaya, 2022).

Kajian Pustaka

Konsep Pembangunan Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya (Bloom & Reenen, 2013).

Suparno dalam Sri Arinah (2017:16) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi dalam Sri Arinah (2017:16) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Menurut Gant dalam Sri Arinah (2017:16) tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan inisudak mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit dalam Sri Arinah (2017:16) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari perlibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu pertama; pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua; pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi (Erawan & Burhanudin, 2019).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu : perencanaan dan pembangunan. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2002:7) bahwa teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan

berbagai kepentingan yang terlibat.

Conyers dan Hills dalam Sri Arinah (2017:17) mendefinikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan (Ile et al., 2023). Tentunya mereka dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada diwilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya. Sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya (Marianata & Hardayani, 2019).

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan (Hari Zamharir, Zulkarnain, 2021).

Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus dibina dan dikembangkan adalah pembangunan desa, Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo dalam Sri Arinah (2017:20) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: Pembangunan desa adalah proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spriritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa (Fahmi et al., 2020).

Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan di berbagai tingkatan (Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional) untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang tumpang tindih yang dapat mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintah juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha (Fahmi et al., 2020).

Musyawarah perencanaan pembangunan di desa merupakan forum penyusunan rencana pembangunan di desa yang bahannya dari musyawarah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Untuk itu kegiatan yang harus dilakukan sebelum Musrenbang ialah musyawarah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa.

Musyawarah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa merupakan forum kegiatan penyusunan rencana pembangunan oleh para perencana pada tingkat kelompok masyarakat, dasa wisma, RT/RW, dusun/lingkungan, desa, dan lain-lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses terjadinya dilapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Tahapan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima cenderung bervariasi. Ada kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam proses musyawarah, sementara ada pula kelompok yang kurang terlibat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Sementara peran pemerintah desa dalam mengelola dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitasnya. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintahan desa dalam memastikan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap musyawarah memiliki korelasi positif dengan hasil yang dihasilkan.

Hambatan dan tantangan dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sejumlah hambatan dan tantangan dalam tahapan pelaksanaan musyawarah. Termasuk diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya musyawarah dalam pembangunan desa. Penanganan hambatan-hambatan ini menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses musyawarah.

Penggunaan teknologi informasi, secara umum penggunaan teknologi informasi dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima masih terbatas. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan teknologi, tantangan seperti aksesibilitas dan literasi digital masih perlu diatasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi. Sementara keputusan dan implementasi dari hasil musyawarah mencakup keputusan-keputusan strategis dalam merencanakan pembangunan desa. Meskipun demikian pentingnya memastikan implementasi yang tepat dan monitor terus menerus perlu diakui. Beberapa kendala implementasi seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus.

Dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa indikator seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun masih perlu diidentifikasi area-area potensial untuk peningkatan lebih lanjut.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima menunjukkan variasi dan faktor-faktor seperti pendidikan dan akses informasi memainkan peran kunci. Peran pemerintah desa memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas musyawarah. Keterlibat aktif pemerintah desa dalam menjaga

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima

transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas menjadi dasar untuk keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan. Identifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan menjadi kunci untuk perbaikan. Strategi pengelolaan konflik dan peningkatan alokasi sumber daya dapat memfasilitasi proses musyawarah dengan lebih lancar. Penggunaan teknologi informasi masih terbatas, namun potensial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi. Inisiatif untuk meningkatkan literasi digital dan aksesibilitas perlu diperkuat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah perlu diikuti dengan implementasi yang cermat. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia memerlukan strategi implementasi yang terarah dan berkelanjutan. Evaluasi dampak pembangunan menunjukkan beberapa peningkatan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk mengidentifikasi areal yang memerlukan peningkatan lebih lanjut.

BIBLIOGRAFI

- Andriani, L. (2022). Analisa Perencanaan Manajemen Keuangan Pada Desa Suka Maju. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan ...*, 2, 1–13.
- Asril, A., & Yoserizal, Y. (2019). *Good Governance or Local Wisdom? Dilemma in Modern Government Practices in West Sumatra, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281016>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89.
- Christijanto, E. (2018). State Sphere Shift into Public Sphere: E-Musrenbang Surabaya City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(3), 392–403. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.63>
- Erawan, E., & Burhanudin, H. (2019). Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8358–8371.
- Fahmi, R., Adiputra, Y. S., & Handrisal. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018. *Student Online Journal*, 1(2), 157–166.
- Hari Zamharir, Zulkarnain. (2021). Reconstruction of the Civic Virtues of Several Ethnicities, as a Strengthening of Pancasila Mutual Cooperation Democracy. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 1(1), 101–107. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2021.1.1.15>
- Ile, K., Kabupaten, B., Timur, F., Yulius, Y., Ola, A., Hage, M. Y., & Yohanes, S. (2023). *Jurnal+Hukum+Online+236-252*. 1(2), 236–252.
- Iskandarsyah Siregar. (2022). Correlation and Logical Consequences between Pancasila and the Perspective of Tradition. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 3(4), 170–181. <https://doi.org/10.33258/lakhomi.v3i4.864>
- Listina, V., & Pratama, R. A. (2023). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2022 (Factors Influencing Community Participation in the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) in Resun Pesisir Village , North Lingga District , Lingga Regency in 2022)*. 2(1), 36–53.
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53–62.
- Marianata, A., & Hardayani, Y. (2019). *MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik RETROSPEKSI REFORMASI DESA*. 11(1), 98–103.
- Maulana, A., Afandi, M. Z., Firdaus Berlianto, M., Arrosyid, M. H., Asmoro, R. W., Abdillah, R., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kelurahan Bendo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 59–63.
- Nasir, I., & Maulana, A. (2021). 10.47521 Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Meranti. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 7(2), 89–94. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i2.205>
- Rusmin, M., Satrianegara, M. F., Ibrahim, H., Lagu, A. M. H., & Rahma, N. (2019). Gambaran Penatalaksanaan Program Kb Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makasar. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, 11(1), 78–93.

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima

- Taufiq Widodo, M., & Kartika, T. (2021). Perbandingan Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus Pelaksanaan E-Musrenbang Tahun 2023 di Kabupaten Mesuji). *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(1), 2022.
- Triono, T., Purwanto, B. H., & Permana, I. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kota Cirebon: Studi Kasus Kelurahan Sunyaragi Tahun Anggaran 2020. *Ijd-Demos*, 4(1), 466–477. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.220>
- Triyo Rachmadi, Titi Pudji Rahayu, Ari Waluyo, & Wakhid Yuliyanto. (2021). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 578–589. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.760>
- Wijaya, K. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis ANALISA PENGELOLAAN APBDes DALAM MENINGKATKAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 76–90.

Copyright holder:

Nike Ardiansyah, Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

